
PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NO 63 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Desi Fitrianiingsih
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 8, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public Policy

Supervision

Effectiveness Program

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine Supervision and Effectiveness, to determine the relationship between Supervision and Effectiveness and to determine the magnitude of the influence of Supervision on Effectiveness in the Sumedang Regency Social Service. This study uses a descriptive analysis method with a quantitative approach and the type of statistics used is descriptive statistics with a non-probability sampling technique with a saturated sampling technique. The number of samples studied was 33 respondents. The analysis used includes percentage calculations, normality tests, correlation coefficient tests, significance tests, and determination coefficient tests. Based on the results of the study, it is known that the Supervision in the Sumedang Regency Social Service is in the very good criteria with analysis results reaching 85%. Then for Effectiveness in the Sumedang Regency Social Service, it is in the very good criteria with analysis results reaching 85%. From the correlation analysis, a correlation value of 0.847 was obtained, indicating a positive and significant relationship between Supervision and Effectiveness in the Sumedang Regency Social Service. From the results of the significance test, a t-count value was obtained which was greater than the t table, namely $8.871 > 2.039$. From the results of the determination coefficient analysis, it is known that the Supervision variable has an influence on Effectiveness of 71.8% while the remaining 28.2% is influenced by other factors not discussed in this study.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Desi Fitrianiingsih

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No.19 Sumedang

Email: fitrianiingsihdesi05@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mengembangkan, dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang sosial di wilayah Kabupaten Sumedang. Tugas utamanya mencakup penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan dampak bencana. Melalui berbagai programnya, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial serta memastikan akses terhadap layanan sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih ada warga masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penanganan dilakukan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan Pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan pelayanan sosial.

Sasaran Pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai latar dari berbagai latar dan golongan dengan prioritas utama para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang saat ini itulah telah di ubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah mereka yang memiliki kriteria masalah sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpang perilaku, korban bencana alam, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berbagai masyarakat sosial yang terjadi di Kabupaten Sumedang disebabkan antara lain derasnya monilitas penduduk, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan sosial, yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial dan berkembang berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. sehubungan hal tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi prioritas kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber data sosial, melindungi warga masyarakat dari kewananan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang merupakan salah satu instansi pemerintah untuk membantu pemerintah Kabupaten Sumedang dalam bidang Sosial terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan uraian tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Berdasarkan tupoksi tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang efisien, serta pengelolaan informasi yang efektif untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai, dan dituntut memiliki produktivitas kerja yang baik sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Maka suatu organisasi atau instansi perlu meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas pegawainya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja secara optimal di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Di Indonesia sendiri, sejahteraan sosial sering dipandang sebagai Tujuan dan kondisi kehidupan yang Sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Dijelaskan juga bahwasannya kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir, yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dibutuhkan untuk melihat Tingkat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Kesejahteraan sosial, perlindungan sosial adalah sebuah upaya untuk menangani resiko dari kecenderungan sosial, program mengenai perlindungan sosial dan juga penanggulan kemiskinan seperti Bantuan Pangan (Rastra), program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Pintar dan masih banyak lagi. Pelayanan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pihak lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa actual

dalam berbagai aspek kelembagaan. Tidak hanya dalam organisasi bisnis, akan tetapi sudah berkembang secara meluas dalam tatanan organisasi pemerintahan.

Dengan berkembangnya zaman dan luasnya pengetahuan juga semakin maju kehidupan manusia, pemerintah mendapatkan berbagai kritik dari publik terutama mengenai hal pelayanan yang dimana publik menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin untuk menuju terciptanya good governance, dalam kritik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tuntutan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Karena itu, kegiatan administrasi memiliki peranan yang sangat berpengaruh di dalam mengatur dan juga mengarahkan kegiatan pelayanan untuk masyarakat. Beberapa hal yang di permasalahan oleh masyarakat saat ini adalah mengenai pelayanan umum, terutama dalam peningkatan kualitas atau nilai pelayanan pemerintah terhadap masyarakat diharapkan dapat memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas untuk public. Dalam era sekarang ini para otonomi daerah sangat dituntut untuk optimal dalam bekerja dan mampu untuk menjawab seluruh tuntutan yang diberikan oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk kualitas maupun dalam bentuk kuantitas pelayanan.

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia juga telah lama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi pada kenyataannya kemiskinan masih menjadi salah satu masalah nasional yang berkepanjangan hingga saat ini. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memperoleh bantuan social dan juga menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif meskipun mereka layak menjadi penerima bantuan. Oleh karena hal ini kabupaten sumedang menerapkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk melihat kembali penerima dari bantuan sosial dan melakukan survei kembali dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terbaru mengenai penerima bantuan, dimana masih banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial tetapi sudah meninggal dunia, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelayanan masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. SLRT diinisiasi untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan data kemiskinan yang sering kali tidak terintegrasi serta akses masyarakat miskin dan rentan terhadap berbagai layanan dasar yang belum optimal. Melalui SLRT, pemerintah menyediakan mekanisme layanan satu pintu yang memungkinkan masyarakat mendapatkan bantuan atau rujukan secara mudah, cepat, dan akurat.

Sistem ini menghubungkan berbagai sektor layanan, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya, sehingga tercipta sinergi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memperkuat keberlanjutan dan legalitas program ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63 Tahun 2018. Perda ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan SLRT, termasuk tata kelola operasional, penguatan Puskesmas di tingkat desa, serta peningkatan kapasitas petugas layanan. Dengan kebijakan ini, SLRT tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan SLRT yang diatur melalui Perda tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyediakan layanan sosial yang inklusif, transparan, dan berbasis data yang akurat

Efektivitas kebijakan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebuah kebijakan dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Konsep efektivitas kebijakan juga berperan dalam pemberian gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam hal pencapaian targetnya khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Salah satu dinas SKPD pemerintah, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mereka akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, diperlukan berbagai komponen yang saling berhubungan, seperti sumber daya manusia, bahan material atau fisik, modal, dan teknologi. Semua komponen tersebut bekerja bersama untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Namun dalam pelaksanaannya, sering kali muncul berbagai masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Masalah tersebut bisa berkaitan dengan waktu, seperti tugas yang tidak diselesaikan dengan baik atau tidak terpenuhinya tenggat waktu (*deadline*). Selain itu, masalah keuangan juga kerap terjadi, misalnya anggaran yang membengkak atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan bukti yang ada. Untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan, diperlukan suatu kegiatan yang berfungsi mengawasi jalannya proses tersebut. Kegiatan ini dikenal sebagai pengawasan.

Pengawasan dinilai sebagai hal penting dalam proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, maupun kegagalan namun demikian dengan adanya pengawasan. Hal ini dapat dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak terlalu jauh dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah dan mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan Pemerintahan khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana ataukah tidak. Bila tidak sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan tindakan tertentu untuk menganganinya. Bila telah sesuai dengan rencana maka perlu perhatian untuk peningkatan kualitas hasil dalam mencapai tujuan Pemerintahan. Pengawasan bukan mencari siapa yang salah namun apa yang salah dan bagaimana membetulkannya.

Namun berdasarkan observasi awal lapangan, peneliti melihat adanya indikasi masalah yang berkaitan dengan efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

1. Adanya keterbatasan perkembangan kualitas SDM, sehingga fasilitator kurang memahami tentang kebijakan SLRT. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya fasilitator yang tidak mampu menjelaskan fungsi dan tujuan SLRT dengan jelas kepada masyarakat, serta kurang terampil dalam mengidentifikasi dan merujuk permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga ke layanan yang sesuai.
2. Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan dan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan. Hal ini dilihat dari masih banyaknya fasilitator yang kurang memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi masyarakat yang mereka dampingi.
3. Penggunaan teknologi tepat guna belum dioptimalkan untuk mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebijakan SLRT. Hal ini dilihat dari minimnya penerapan sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan secara *real-time*.

Namun berdasarkan observasi awal lapangan, peneliti melihat adanya indikasi masalah yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

1. Kurangnya monitoring sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai yang mengoperasikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), sehingga implementasi SLRT belum berjalan secara optimal. Hal ini mengakibatkan rendahnya semangat kerja fasilitator dan kurang maksimalnya upaya dalam mencapai tujuan program.
2. Kurangnya pelaksanaan audit internal yang rutin yang tidak dilakukan secara teratur dapat menyebabkan pengawasan terhadap jalannya sistem SLRT menjadi kurang efektif, sehingga berdampak pada penyaluran bantuan dan pelayanan yang tepat sasaran.
3. Kurangnya tercapainya target kerja yang efektif dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara target manajer dan pencapaian pegawai, serta pengelolaan penghargaan yang kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dalam penurunan motivasi pegawai, efisiensi pengeluaran, dan kinerja organisasi.

Berdasarkan indikasi efektivitas dan pengawasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan pengawasan, rendahnya efektivitas dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh pengawasan yang belum optimal.

Adapun Research Gap mengenai Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 1. Rangkuman *Research Gap*

<i>Research Gap</i>	Hasil	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja	Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Biro Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Hartati, M. Sawir, M. Aldrin Akbar, dan Ahmad Jusmin (2020)
	Pengaruh Efektivitas Iklan Televisi, Kualitas Produk Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Susu Ultra Milk (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Widya Gama Lumajang)	Muhammad Fauzan Ramadoni, Dra. Ninik Lukiana, MM.2, dan Anisatul Fauziah, S.Pd., M.Pd3 (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menjelaskan secara rinci mengenai Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas.

2. METHOD

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2024: 16-17) mengatakan bahwa: Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis. Menurut Sugiyono dalam Rizkiani (2021: 50) yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah sebagai berikut: Metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung melalui proses pengumpulan penyusunan dan penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada.

Metode deskriptif analisis menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian, dengan cara mengumpulkan data, menyusun data kemudian mengolahnya dan menganalisisnya secara kuantitatif sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan keberadaan variabel-variabel secara virtual, serta hubungan variabel 1 dengan yang lainnya. Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan mampu mengungkap fenomena yang dikaji secara sistematis. Untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti yaitu dengan melihat bagaimana kedudukan variabel bebas dan variabel terikat, bagaimana hubungan dan atau pengaruh diantara keduanya.

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2024: 127) mengatakan bahwa: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Sedangkan menurut Arikunto (Rizkiani, 2021: 54) mengatakan bahwa: "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi kasus". Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 orang. Berikut ini merupakan populasi pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang:

Tabel 2. Populasi Penelitian

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial	7
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	6
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial	6
TOTAL		33

b. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2024: 128) "Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel". Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Teknik sampling jenuh atau sampling total menurut Sugiyono (2024: 133) adalah "teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel".

c. Sampling Penelitian

Menurut Sugiyono dalam Nurbaiti (2016: 5) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh maka sampel penelitian melibatkan seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumedang berjumlah 33 responden. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner
2. Observasi terstruktur.
3. Studi dokumentasi

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Results

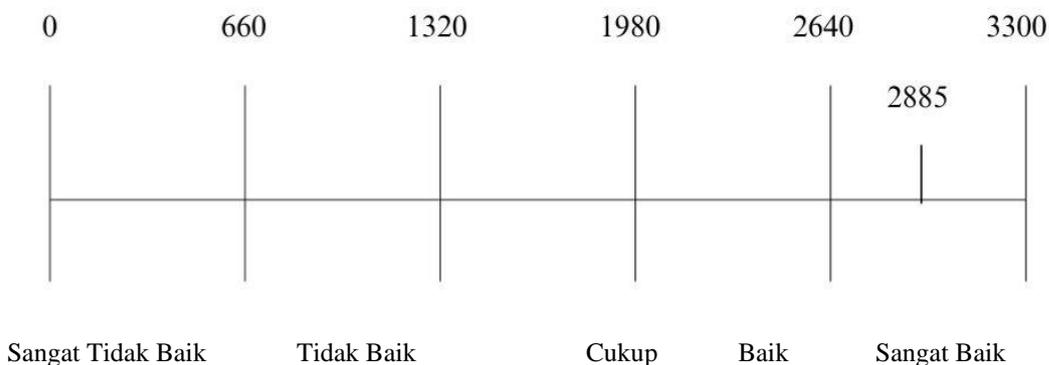
Tabel 3. Deskriptif Frekuensi Variabel Pengawasan

No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
1	Seleksi Karyawan	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
2	Objektivitas Evaluasi	33	138	165	83,8%	Baik
3	Ketersediaan Tenaga Kerja	33	139	165	84,4%	Sangat Baik
4	Pelatihan Karyawan	33	138	165	83,4%	Baik
5	Penyesuaian Kebijakan	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
6	Monitoring Sumber Daya	33	146	165	88,8%	Sangat Baik
7	Pengadaan Sumber Daya	33	137	165	83,3%	Baik
8	Standar Operasional	33	138	165	83,4%	Baik
9	Evaluasi Kinerja	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	33	140	165	84,5%	Sangat Baik
11	Perbaikan Penyimpangan	33	145	165	87,8%	Sangat Baik
12	Penyusunan Kinerja	33	141	165	85,5%	Sangat Baik
13	Audit Internal	33	142	165	86,6%	Sangat Baik
14	Kepatuhan Disiplin Kerja	33	145	165	87,8%	Sangat Baik
15	Tercapainya Target Kerja	33	135	165	81,2%	Baik
16	Pemberian Hadiah	33	137	165	83,3%	Baik
17	Bonus Karyawan	33	133	165	80,1%	Baik
18	Alokasi Anggaran	33	137	165	83,3%	Baik
19	Pengendalian Aturan	33	143	165	88,7%	Sangat Baik
20	Transparan Dana	33	142	165	86,6%	Sangat Baik
Σ			2805	3300		
Rata-Rata			140.25	165		

Untuk memberi interpretasi terhadap implementasi kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka skor ideal dapat dihitung sebagai berikut :

1. 20 (item) x 33 responden x 1 (bobot) = 660
2. 20 (item) x 33 responden x 2 (bobot) = 1320
3. 20 (item) x 33 responden x 3 (bobot) = 1980
4. 20 (item) x 33 responden x 4 (bobot) = 2640
5. 20 (item) x 33 responden x 5 (bobot) = 3300

Jika diinterpretasikan ke dalam skala interval di atas, maka variabel Pengawasan akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Interpretasi Variabel Pengawasan**

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden untuk variabel Pengawasan berada pada tahap Sangat Baik, karena total skor yang dihasilkan sebesar 2884 pada interval 2640-3300. Oleh karena itu jika dipresentasikan (%) hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{skor total}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{2885}{3300} \times 100\% \\ &= 87,42\% \end{aligned}$$

Jika dinyatakan dalam bentuk hipotesis, maka nilai rata-rata prosentase sebesar 87,42% untuk variabel Pengawasan dinyatakan dengan $H_a: \mu \geq 75\%$ yang Pengawasan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mencapai lebih dari atau sama dengan 75% dari kriteria ideal diterima.

Tabel 4. Deskriptif Frekuensi Variabel Efektivitas Kebijakan

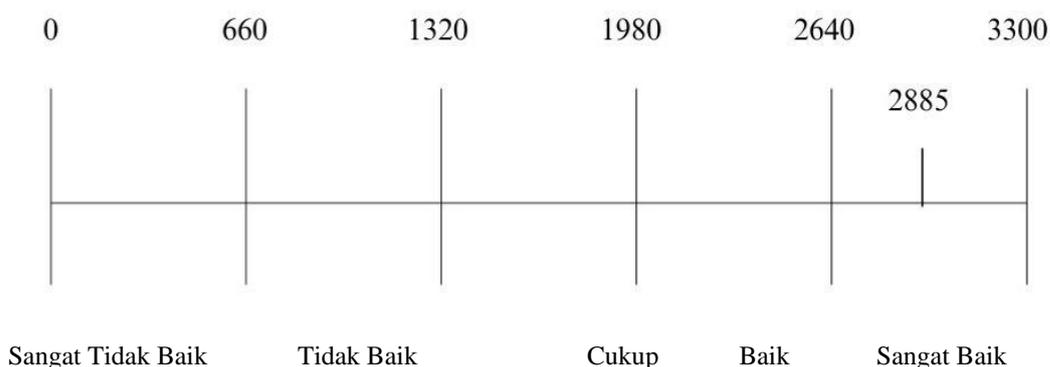
No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
1	Penyesuaian Karyawan	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
2	Penyesuaian Dengan Budaya	33	141	165	85,5%	Sangat Baik
3	Penyesuaian Terhadap Perubahan Regulasi	33	137	165	83,3%	Baik
4	Fleksibilitas Dalam Menghadapi Rintang Eksternal	33	138	165	83,4%	Baik
5	Jumlah Pegawai	33	145	165	87,8%	Sangat Baik
6	Penggunaan Anggaran	33	142	165	86,6%	Sangat Baik
7	Kebutuhan fasilitas	33	132	165	80,0%	Baik
8	Pemenuhan Kebutuhan	33	140	165	84,5%	Baik
9	Kualitas Proses Pekerjaan	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
10	Jumlah dan Kualitas Kerja Pegawai	33	140	165	84,5%	Baik
11	Kesesuaian Dengan Harapan Masyarakat	33	145	165	87,8%	Sangat Baik
12	Peningkatan Ouput Layanan Yang Dihasilkan	33	141	165	85,5%	Baik

No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
13	Pemenuhan Kebutuhan	33	143	165	86,7%	Sangat Baik
14	Kesejahteraan Pegawai	33	147	165	89,9%	Sangat Baik
15	Penghargaan Karyawan	33	135	165	81,2%	Baik
16	Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dalam Kualitas Layanan	33	141	165	85,5%	Baik
17	Perkembangan Kualitas SDM	33	129	165	78,8%	Baik
18	Pemenuhan Sumber Dana	33	141	165	85,5%	Sangat Baik
19	Penggunaan Teknologi Tepat Guna	33	137	165	83,3%	Baik
20	Peningkatan Inovasi	33	145	165	87,8%	Sangat Baik
Σ			2805	3300		
Rata-Rata			140.25	165		

Untuk memberi interpretasi terhadap Efektivitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka skor ideal dapat dihitung sebagai berikut :

1. 20 (item) x 33 responden x 1 (bobot) = 660
2. 20 (item) x 33 responden x 2 (bobot) = 1320
3. 20 (item) x 33 responden x 3 (bobot) = 1980
4. 20 (item) x 33 responden x 4 (bobot) = 2640
5. 20 (item) x 33 responden x 5 (bobot) = 3300

Jika diinterpretasikan ke dalam skala interval di atas, maka variabel efektivitas kebijakan akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Interpretasi Variabel Efektivitas Kebijakan

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden untuk variabel Efektivitas berada pada tahap Sangat Baik, karena total skor yang dihasilkan sebesar 2807 pada interval 2640-3300. Oleh karena itu jika dipresentasikan (%) hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{skor total}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{2805}{3300} \times 100\%$$

$$= 87,42\%$$

Jika dinyatakan dalam bentuk hipotesis, maka nilai rata-rata prosentase sebesar 85,42% untuk variabel Efektivitas dinyatakan dengan $H_a: \mu \geq 75\%$ yang Efektivitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mencapai lebih dari atau sama dengan 75% dari kriteria ideal diterima.

Hubungan Antara Variabel Pengawasan dengan Efektivitas

Untuk mengetahui seberapa kuat tingkat hubungan antara variabel Pengawasan dengan Efektivitas, menurut Sugiyono (2024: 248), digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,00-0,199	Sangat Rendah
2	0,20-0,399	Rendah
3	0,40-0,599	Sedang
4	0,60-0,799	Kuat
5	0,80-1,000	Sangat Kuat

Berdasarkan hasil perhitungan pada sub bab hasil penelitian, diketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,847. Nilai tersebut termasuk pada kategori **Sangat Kuat**, hal ini dapat dilihat pada tabel 4. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel Pengawasan dengan Efektivitas. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengawasan, maka semakin baik pula Efektivitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Menurut Robert J. Mockler (1972) menyatakan bahwa: Hubungan kausalitas antara pengawasan dan efektivitas dapat dijelaskan melalui berbagai teori manajemen dan administrasi. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Pengawasan (*Control Theory*). Teori ini menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Efektivitas, bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas organisasi. Melalui pendekatan Teori Pengawasan (*Control Theory*), pengawasan dipahami sebagai proses sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengawasan dengan Efektivitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang berada pada tingkat korelasi **Sangat Kuat**. Dengan nilai koefisien korelasi 0,847 dan uji signifikan yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $8,871 > 2,039$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan analisis data tersebut, maka hipotesis penelitian yang menyatakan “terdapat hubungan positif antara Pengawasan dengan Efektivitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang”, **diterima**. Sedangkan hipotesis statistik yang menyatakan

- $H_0: \mu = 0$, artinya:
Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengawasan dengan Efektivitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. **Ditolak**
- $H_a: \mu \neq 0$, artinya:
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengawasan dengan Efektivitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. **Diterima**

Pengaruh Variabel Pengawasan Terhadap Variabel Efektivitas

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pengawasan Terhadap Efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi antara kedua variabel diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,718. Jika nilai tersebut diinterpretasikan pada tabel 4., maka nilai determinasi berada pada kategori Kuat karena berada pada rentang 0,60–0,799. Hasil uji koefisien determinasi apabila di prosentasekan sebesar 71,8%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap Efektivitas memberikan pengaruh 71,8% dan sisanya 28,2% dipengaruhi oleh faktor lain atau faktor epsilon.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif Pengawasan terhadap Efektivitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang” **diterima**. Sedangkan hipotesis statistik yang menyatakan:

- $H_0: \mu = 0$, artinya:
Tidak Terdapat Pengaruh yang positif antara Pengawasan terhadap Efektivitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. **Ditolak**.
- $H_a: \mu \neq 0$, artinya:
Terdapat Pengaruh yang positif antara Pengawasan terhadap Efektivitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. **Diterima**.

3.2. Discussion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang berada dalam kategori sangat baik dengan skor rata-rata sebesar 85%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi kontrol, baik dari aspek input, proses, hingga output, telah dilakukan secara efektif. Efektivitas pelaksanaan kebijakan SLRT juga tercatat sangat baik, dengan nilai yang sama sebesar 85%. Dari hasil uji korelasi, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pengawasan dengan efektivitas kebijakan, ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,847. Selanjutnya, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap efektivitas adalah signifikan (t hitung 8,871 > t tabel 2,039), dan uji determinasi menunjukkan bahwa pengawasan memberikan kontribusi sebesar 71,8% terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan SLRT. Sisanya, yaitu 28,2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hasil ini menegaskan pentingnya peran pengawasan yang sistematis dan terencana dalam meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

4. CONCLUSION

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Makin tinggi kualitas pengawasan, makin efektif pula pelaksanaan kebijakan dalam menjangkau sasaran program. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang mencakup monitoring, audit internal, serta peningkatan kapasitas SDM dalam memahami peran dan mekanisme kerja SLRT. Penelitian ini memberikan dasar empiris bahwa pengawasan bukan hanya fungsi administratif, tetapi juga komponen strategis dalam mendukung good governance di tingkat lokal.

REFERENCES

- Br. Surbakti, R. P., & Sihombing, S. (2022). Pengaruh Pelatihan, Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pln (Persero) Ulp Berastagi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 25-39.
- Dianingratri, R., & Munandar, M. A. (2022). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi Dan Umkm Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 36-41.
- Heryati, H. (2015). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Cahaya Enim. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Maulina, N. (2014). Korelasi Pengawasan Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Padakantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Administrasi*, 2(1), 13-27.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppk) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Mendome, M., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.
- Ramadoni, M. F. (2021). Pengaruh Efektivitas Iklan Televisi, Kualitas Produk Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Susu Ultra Milk (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Widya Gama Lumajang).

- Sawir, M., & Akbar, M. A. (2020). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua. *The Journal Of Business And Management Research*, 3(1), 299-308.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Cv. Rtujuh Media Printing.
- Weber, M. (2019). Bab Iv Teori Pengawasan Kekuasaan. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, 81.
- Zain, M. H., & Basuki, E. (2023). Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. *Acton*, 19(2), 27-39
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. (No Title).
- Terry, G. R. (1960). *Principles Of Management* Homewood Il: Richard D. Irwin. Inc.
- Daft, R. L., Murphy, J., & Willmott, H. (2010). *Organization Theory And Design* (Vol. 10). Mason, Oh: South-Western Cengage Learning.